

PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA APARATUR PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

Salehoddin

(Dinas Pendidikan Pemkab Sumenep)

Bambang Suhardito

(Universitas Airlangga)

Abstract

Sistem akuntansi sebagai alat kontrol untuk mencapai tujuan pemerintah harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu agar sistem akuntansi pemerintahan dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan roda pemerintahan maka para penyaji dan pengelola harus memahami sistem akuntansi dengan berdasarkan aturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kinerja Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Pemerintahan Kabupaten Sumenep.

Obyek penelitian yang digunakan adalah manajer tingkat menengah dan tingkat bawah dari pemerintah daerah yaitu pejabat Eselon II, III, dan pejabat fungsional (Pejabat Penatausahaan Keuangan dan bendahara) pada badan, dinas, dan kantor di Pemerintah Kabupaten Sumenep, sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara *purposive sampling*, yang mengambil sampel 66 orang responden. Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemahaman sistem akuntansi dan pemahaman sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Sumenep. Dengan demikian hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah maupun pemahaman sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah terbukti kebenarannya.

Kata Kunci : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, kinerja Aparatur

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pula yang harus dilakukan oleh setiap Aparatur di Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah & "Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (SPI)".

Terkait dengan optimalisasi pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain dijelaskan dalam Pasal 58 ayat (1) dalam rangka meningkatkan kinerja, tranparasi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern (SPI) di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya kewajiban yang sudah diamanahkan ini tidak dilaksanakan secara maksimal oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan dugaan kurangnya pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern oleh para aparatur yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga hal ini diduga berdampak pada kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumenep

TELAAH PUSTAKA

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Boockholdt (1996) dalam Tuasikal menyatakan bahwa sistem akuntansi menyediakan informasi bagi setiap individu yang ada didalam dan di luar organisasi, pemahaman mengenai informasi sistem akuntansi tersebut dapat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah, jika aparatur pemerintah tersebut memahami sistem akuntansi dengan benar maka kinerja aparatur tersebut akan baik

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah

Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hal ini diperkuat oleh teori Gul dan Chia (1994) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian yang digunakan oleh suatu organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja sumber daya manusia organisasi.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dari masing-masing variabel akan diturunkan kedalam bentuk pertanyaan penelitian dalam bentuk kuesioner sebagai instrumen pada penelitian ini. Adapun definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi Keuangan Daerah adalah prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai prinsip-

prinsip akuntansi berterima umum. Dalam hal ini Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dilambangkan dengan variabel (X_1)

b. Pemahaman Sistem Pengendalian Intern

Pemahaman Sistem Pengendalian Intern adalah tingkat penguasaan terhadap pengetahuan Sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah. Pemahaman Sistem Pengendalian Intern dilambangkan dengan variabel (X_2)

c. Kinerja Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kinerja Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah kemampuan seseorang atau individu pada Satuan Kerja Perangkat daerah atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan serta pengawasan. Kinerja Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dilambangkan dengan variabel (Y)

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (X_2) dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang mengambil data dari pejabat Pemerintah Kabupaten Sumenep. Skala pengukuran yang digunakan dalam mengukur variabel-variabel tersebut tersebut adalah menggunakan skala likert.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah manajer tingkat menengah dan tingkat bawah dari pemerintah daerah yaitu pejabat Eselon II, III, dan pejabat fungsional (Pejabat Penatausahaan Keuangan dan bendahara) pada badan, dinas, dan kantor di Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Sampel adalah bagian dari populasi, yang mempunyai ciri dan karakteristik yang sama dengan populasi Sumarsono (2004;44), sedangkan sampel masing-masing SKPD terdiri dari 3 orang aparat pemerintah sebagai pejabat yang terlibat dalam penyusunan anggaran, melaksanakan anggaran, maupun dalam mempertanggungjawabkan anggaran yaitu:

1. Eselon II pada Dinas dan Badan (Pengguna Anggaran/KPA).
2. Eselon III pada Kantor (Pengguna Anggaran/KPA)
3. Pejabat Fungsional (Pejabat Penatausahaan Keuangan)
4. Pejabat Fungsional (Bendahara Pengeluaran)

Anggota populasi dalam penelitian ini adalah homogen dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai sample dengan pertimbangan mereka adalah:

1. Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan APBD
2. Pegawai Negeri Sipil

Mengacu pada Peraturan Keuangan yang sama.

PEMBAHASAN

1. Hasil Pengujian Validitas

Hasil pengujian validitas untuk keseluruhan variabel yang diteliti yaitu pemahaman sistem akuntansi (X_1) dan pemahaman sistem pengendalian intern (X_2) serta kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah (Y) memberikan nilai

signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah valid,

2. Hasil pengujian Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas kuesioner, dapat diketahui nilai *Cronbach Alpha* dari masing-masing variabel yaitu variabel pemahaman sistem akuntansi (X_1) sebesar 0,665, sistem pengendalian intern (X_2) sebesar 0,649 maupun kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah (Y) sebesar 0,720.

Nilai cronbach alpha seluruh variabel tersebut telah memenuhi syarat pengujian yaitu lebih besar dari 0,600, Hal tersebut menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk telah reliabel sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian berikutnya.

3. Hasil Pengujian Normalitas

Hasil pengujian normalitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,01767351
Most Extreme Differences	Absolute	,091
	Positive	,051
	Negative	-,091
Kolmogorov-Smirnov Z		,741
Asymp. Sig. (2-tailed)		,642

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dapat diketahui bahwa nilai statistik *Kolmogorov-Smirnov* yang diperoleh mempunyai taraf signifikan yang lebih besar dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa semua variabel yang diteliti berdistribusi normal.

4. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

a. Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas diperoleh besarnya nilai korelasi yang signifikan antara *Unstandardized Residual* dengan masing-masing variabel bebas yang diteliti yaitu pemahaman sistem akuntansi (0,917) dan pemahaman sistem pengendalian intern (0,606).

Nilai korelasi tersebut memiliki nilai taraf signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi penyimpangan heteroskedastisitas pada variabel-variabel bebas yang diteliti.

b. Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai VIF seluruh variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pemahaman sistem akuntansi (1,000) dan pemahaman sistem pengendalian intern (1,000). lebih kecil dari 10, artinya seluruh variabel bebas pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinier (Ghozali, 2001:57).

5. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS diperoleh persamaan regresi sebagai berikut (lampiran 7) :

$$Y = -3,263 + 0,326 X_1 + 0,274 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas mempunyai arti bahwa:

b_0 = Konstanta = -3,263

Apabila variabel Pemahaman Sistem Akuntansi (X_1) dan Sistem Pengendalian Intern (X_2) adalah konstan atau sama dengan nol, maka nilai Kinerja Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) adalah sebesar -3,263.

b_1 = Koefisien regresi untuk $X_1 = 0,326$

Menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel Pemahaman Sistem Akuntansi (X_1) yaitu 0,326 dan mempunyai koefisien regresi positif. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang searah dengan variabel terikat. Jadi setiap ada kenaikan pada variabel Pemahaman Sistem Akuntansi (X_1) sebesar 1 satuan, dapat meningkatkan nilai Kinerja Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) sebesar 0,326 dan sebaliknya dengan asumsi bahwa variabel lain adalah konstan.

b_2 = Koefisien regresi untuk $X_2 = 0,274$

Menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (X_2) yaitu 0,274 dan mempunyai koefisien regresi positif. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang searah dengan variabel terikat. Jadi setiap ada kenaikan pada variabel Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (X_2) sebesar 1 satuan, dapat meningkatkan Kinerja Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) sebesar 0,274 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

6. Uji Kecocokan Model

Untuk memprediksi keakuratan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji F.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 4,806 dengan taraf signifikan sebesar 0,011. Karena taraf signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka model regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu: $Y = -3,263 + 0,326 X_1 + 0,274 X_2$ cocok digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut juga dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel pemahaman sistem akuntansi (X_1) dan pemahaman sistem pengendalian intern (X_2) memiliki korelasi kurang kuat dengan kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah (Y) yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,364 atau hanya sebesar 3,64% (lampiran 7). sedangkan besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,132 yang berarti bahwa variabel pemahaman sistem akuntansi (X_1) dan pemahaman sistem pengendalian intern (X_2) mampu menjelaskan perubahan pada variabel kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah (Y) sebesar 13,2% dan sisanya sebesar 66,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.

7. Pengujian Hipotesis Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi (X_1) dan Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (X_2) Terhadap Kinerja Aparatur Satuan Kerja Pemerintah (Y)

Adapun hasil dari pengujian dengan menggunakan uji t adalah sebagai berikut:

Coefficients ^a						
Model		t	Sig.	Correlations		
				Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	-,407	,685			
	Pemahaman Sistem Akuntansi Daerah	2,148	,036	,249	,261	,252
	Sistem Pengendalian Intern	2,264	,027	,262	,274	,266

a. Dependent Variable: Kinerja Aparatur

Berdasarkan hasil pengujian untuk melihat pengaruh nyata tidaknya masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi (X_1) terhadap Kinerja Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y).

Nilai koefisien korelasi (r) yaitu sebesar 0,261. sedangkan nilai koefisien determinasi atau pengaruh (r^2) parsial variabel pemahaman sistem akuntansi (X_1) terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah (Y) adalah sebesar $(0,261)^2 = 0,0681$ atau 6,81%. Jadi pengaruh yang telah diberikan antara pemahaman sistem akuntansi (X_1) dengan kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah (Y) sebesar 6,81%. Sedangkan nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah 2,148 dengan taraf signifikan sebesar 0,036. Karena taraf signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka secara nyata pemahaman sistem akuntansi (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah (Y).

Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah dapat terbukti kebenarannya.

2. Pengaruh Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (X_2) terhadap Kinerja Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y).

Nilai koefisien korelasi (r) yaitu sebesar 0,274. sedangkan nilai koefisien determinasi atau pengaruh (r^2) parsial variabel pemahaman sistem pengendalian intern (X_2) dengan kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah (Y) adalah sebesar $(0,274)^2 = 0,0750$ atau 7,5%. Jadi pengaruh yang telah diberikan antara pemahaman sistem pengendalian intern (X_2) terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah (Y) sebesar 7,5%. Sedangkan nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah 2,264 dengan taraf signifikan sebesar 0,027. Karena taraf signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka secara nyata pemahaman sistem pengendalian intern (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah (Y).

Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pemahaman sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah dapat terbukti kebenarannya.

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi terhadap Kinerja Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pemahaman sistem pengendalian intern terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Sumenep dengan pengaruh sebesar 7,5%. Adanya pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa ketika pemahaman sistem pengendalian intern meningkat maka akan dapat meningkatkan pula kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah serta sebaliknya.

Sebagaimana diketahui, sistem akuntansi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu bentuk reformasi pengelolaan keuangan negara dari *single entry* menjadi *double entry*, dari *cash basis* menjadi *accrual basis*. Minimnya pemanfaatan laporan keuangan itu karena masih rendahnya pemahaman pengetahuan akuntansi. Masyarakat tidak banyak tahu informasi-informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan, hanya orang-orang dan masyarakat tertentu yang bisa membaca dan mengerti informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan itu.

Hasil penelitian ini telah berhasil mendukung teori *Louise* (1999), yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi dapat digunakan untuk mengukur kinerja karena mempertimbangkan reliabilitas dan konsistensi serta teori *Collier* (1997), yang menegaskan bahwa Sistem Akuntansi merupakan alat untuk memediasi hubungan antara pemerintah dengan *stake holder*.

a. Pengaruh Pemahaman Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pemahaman sistem pengendalian intern terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Sumenep dengan pengaruh sebesar 7,5%. Adanya pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa ketika pemahaman sistem pengendalian intern meningkat maka akan dapat meningkatkan pula kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah serta sebaliknya.

Hasil penelitian ini telah berhasil mendukung teori *Reck* (2001), menyatakan bahwa informasi keuangan dan pengendalian manajemen selain untuk menilai alokasi sumber daya manusia juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja serta teori *Gul* (1991), menyatakan Sistem pengendalian yang digunakan oleh suatu organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja sumber daya manusia di organisasi.

Implikasi Hasil Penelitian

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di pemerintah Kabupaten Sumenep maka implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pemerintah Kabupaten Sumenep untuk lebih memaksimalkan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga nantinya kinerja aparatur bisa lebih ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa upaya diantaranya memberikan pelatihan-pelatihan atau *workshop* lebih spesifik mengenai sistem akuntansi dan sistem pengendalian intern. Seperti *workshop* implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, workshop tentang Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hipotesis penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Pemahaman sistem akuntansi terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Sumenep ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi (r) yaitu sebesar 0,261. sedangkan nilai koefisien determinasi atau pengaruh (r^2) parsial variabel pemahaman sistem akuntansi (X_1) terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah (Y) adalah sebesar $(0,261)^2 = 0,0681$ atau 6,81%. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah dapat terbukti kebenarannya.

b. Pemahaman sistem pengendalian intern terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Sumenep, ini dibuktikan dengan Nilai koefisien korelasi (r) yaitu sebesar 0,274. sedangkan nilai koefisien determinasi atau pengaruh (r^2) parsial variabel pemahaman sistem pengendalian intern (X_2) dengan kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah (Y) adalah sebesar $(0,274)^2 = 0,0750$ atau 7,5%. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pemahaman sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja aparatur satuan kerja perangkat daerah dapat terbukti kebenarannya.

Saran

1. Diharapkan bagi Pemkab Sumenep untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur perangkat daerah Kabupaten Sumenep dengan cara melalui pelatihan-pelatihan atau *workshop* dengan materi yang lebih spesifik serta sering mengadakan seminar-seminar ataupun praktek kerja bagi pihak yang bersangkutan agar dapat menerapkan teori yang telah diterimanya khususnya mengenai pemahaman sistem akuntansi dan sistem pengendalian intern yang terbukti berpengaruh terhadap kinerja dalam bentuk kerja aktif di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumenep.

2. Disarankan untuk menggunakan variabel lain yang diharapkan juga memiliki pengaruh terhadap meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah misalnya variabel pendidikan dan pelatihan ataupun variabel kecerdasan emosional dari para pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. ***Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik***. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 No. 02. Hal. 18–30.
- Bastian, Indra, 2006 ***Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia***, PSASP, Yogyakarta, Salemba Empat
- Bodnar, George H., and Hopwood, William. 2006. ***Sistem Informasi Akuntansi***. Edisi 9. Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Bookholdt, 1996. **Accounting Information Systems Transaction Processing and Controls**. Fourt Edition, Erwin
- Boynton, W.C., Johnson, R.N dan Kell, W.G. 2003. **Modern Auditing**. Edisi ketujuh. Jilid 1. Penerbit Erlangga, Jakarta. Diterjemahkan dari *Modern Auditing*. Seventh Edition. John Willey & sons, Inc.
- Case, E. Fred. 2002 **The Budget as measure of the Federal Urban Housing Program The Journal of Finance**. Volume 6.
- Collier, 1997. **The Power of Accounting; A Field Study of Local Financial Management in a Police Force**. Aston Business School Research Institute.
- COSO, 1992. **Model Evaluasi Pengendalian Internal**, Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commision
- Darise, Nurlan 2008 **Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)**, Jakarta, PT Indeks.
- Depkominfo (Departemen Komunikasi dan Informasi). 2006. **Depkeu Harus Segera Benahi Pengelolaan Keuangan Negara**. 4 Oktober. <http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=berita&view=1&id=BRT061004100101>
- Gul, F.A. 1991. **The Effect of Management Accounting System and Environmental Uncertainty on Small Business Manager's Performance**. Accounting and Business research. Vol. 22. No. 85 (Winter). p.57-61.
- Gul, and Chia, 1994. **The Effect of Management Accounting System, Perceived Environmental uncertainty and Decentralization on Managerial Performance: A Test of Three Way Interaction**. Accounting and Business research. Vol. 19. p. 413-426.
- Hafiz Tanjung, Abdul 2008 **Akuntansi Pemerintahan Daerah Konsep dan Aplikasi**, Bandung, Alfabeta.
- _____, 2009 **Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPKD dan Pemerintah Daerah**, Jakarta, Salemba Empat.
- _____, 2009 **Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD**, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2005 **Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah**. Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta
- _____, 2007 **Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah**. Edisi Tiga, Salemba Empat, Jakarta
- Hariadi. Pramono. 2010 **Pengelolaan Keuangan Daerah**, Jakarta, Salemba Empat.
- Hay, 1997 **Essentials of Accounting For Governmental and Not for Profit Organizations**, Irwin. Inc.
- Herbert, Leo. Larry N. Killough and Alan Walter. 1984 **Governmental Accounting and Control**. Cole Publishing Company
- Hevesi, G. Alan. 2005. **Standards for Internal Control in New York State Government**. www.osc.state.ny.us
- Hogye, 2002. **Local Government Budgetting. Local Government and Public Service Reform Initiative**.
- Jhon W, 1997 **The Behavioral Foundations of Stewardship Accounting and a Proposed Program of Research : What is Accountability**. Behavioral Research in Accounting, Vol.9

- Lin, 1998. ***The Housing Value-Relevance of Governmental Accounting Information.*** Journal of Accounting and Public Policy 17.
- _____, 1993. ***Harmonizations of Financial Reporting by Governments in Canada, Financial Accountability & Management.*** 9 (1). February
- Louise, 1999. ***Performance Measurement and Accountability in Victorian Local Government.*** The International Journal of Public Sector Management. Vol 12
- Macintosh, N.B. 1994. ***Management Accounting and Control Systems.*** John Wiley & Sons. New York.
- Mardiasmo, 2002 ***Akuntansi Sektor Publik***, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mahmudi, 2007 ***Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***, Edisi Pertama, Yogyakarta
- Mahmudi dan Mardiasmo, 2004 ***Local Government Performance measurement In The Era of Local Autonomy;*** The Case of Slemen Regency Yogyakarta, SOSIOSAINS. 17 (1). Hal 117-133
- Mwita, 2000. ***Performance Management Mode a System Based Approach to Public Service Quality,*** The International Journal of Public Sector Management. Vol. 13
- Neu, 2000. ***Accounting and Accountability Relations : Colonizations, Genocide and Canada's First Nations,*** Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol 13 No. 13
- Newkirk, 1986. ***Improving Financial Information Systems in Local Government,*** Management Accounting
- Nordiawan, Deddi. 2009 ***Akuntansi Sektor Publik***, Salemba Empat, Jakarta
- Nur, 2004 ***Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi.*** Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Pamungkas, Bambang 2005. ***Pengaruh Kualitas Peraturan Perundang-Undangan, Penerapan Akuntansi Keuangan Sektor Publik dan Penerapan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disertasi Pascasarjana Universitas Padjadjaran,*** Bandung
- Peterson, 1994. ***Budgetting in Kenya : Practice and Prescription,*** Public Budgetting & Finance. Vol. 14 No. 3, Fall
- Purdy, E. Derek, 1993. ***Accounting Control, Change and The Perceptions of Managers, Financial Accountability and Management,*** 9 (1), February
- Reck L. Jacqueline, 2001. ***The Usefulness of Financial and Non Financial Performance Information in Resource Allocation Decitions,*** Journal of Accounting and Public Policy 20.
- Republik Indonesia, ***UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara***
- _____, ***UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara***
- _____, ***UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah***
- _____, ***UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah***
- _____, ***PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan***

- _____, **PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**
- _____, **PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**
- _____, **PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 **Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**
- _____, Nomor 59 Tahun 2007 **Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Sumarsono, 2004. **Metode Penelitian Akuntansi**, Edisi Revisi
- Zimmerman, Jerold 2000, **Accounting for Decision Making and Control**, Third Edition, Mc. Graw-Hill Higher Companies